



REFUNGSIONALISASI NILAI-NILAI BUDAYA BUTON SEBAGAI RESOLUSI KERAWANAN SOSIAL DI KOTA BAUBAU

REFUNCTIONALIZATION OF BUTON CULTURAL VALUES AS A RESOLUTION OF SOCIAL VULNERABILITY IN THE CITY OF BAUBAU

Tasrifin Tahara^{1,*}, Mungsi Lampe², Dinna Dayana La Ode Malim³

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan KM10 Tamalanrea, Makassar

³Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, No. 124, Baubau

Dikirim: 23 Agustus 2019; Disetujui: 30 Oktober 2019; Diterbitkan: 30 Desember 2019

DOI: [10.46891/kainawa.1.2019.101-114](https://doi.org/10.46891/kainawa.1.2019.101-114)

Inti Sari

Artikel ini merupakan hasil penelitian kami tentang refungsionalisasi nilai-nilai budaya Buton dalam mengatasi kerawanan sosial di Kota Baubau, serta strategi memfungsikan kembali nilai-nilai budaya Buton sebagai upaya preventif dalam mengatasi kerawanan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Kota Baubau sebagai lokasi utama pemukiman kelompok pewaris nilai luhur Budaya Buton era Kesultanan Buton, namun masih sering terjadi tindakan kekerasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kekayaan nilai-nilai budaya Buton menunjukkan potensi besar untuk dilakukan fungsionalisasi dalam berkehidupan masyarakat secara harmonis dan kokoh serta dinamis ke depan. Dalam rangka refungsionalisasi tersebut, perlu diperlukan strategi-strategi: pengaktifan peran desa adat, pembentukan dan atau penguatan kelembagaan budaya Buton yang sudah ada sebelumnya, memasukkan nilai-nilai budaya Buton dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, memeratakan pemungisian beberapa komponen nilai budaya utama (Perda/Peraturan Daerah), dan kajian mendalam dan berkelanjutan tentang nilai-nilai budaya Buton untuk dijadikan referensi dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan di segala bidang kehidupan.

Kata Kunci: kerawanan sosial, nilai-nilai budaya, refungsionalisasi.

Abstract

This article is the research on re-functionalization of Buton cultural values in overcoming social vulnerability in the City of Baubau, and the strategy to re-function Buton cultural values as a preventive measure in overcoming social vulnerability. The research is used qualitative research. The scope area of this research was in Baubau City, as well as the center of the linkage of the heir groups where the values of the Buton sultanate are longer exist but frequently less practiced. Data collection techniques carried out by collection, arrangement, and in-depth interviews. The well-heeled and complexity of cultural values of Buton will be the source of vigorous society which are dynamic and more challenging in future comings. Within the framework of the renewal the past values and the attachment of the upcoming values come from the values of ethnicity that breathe in Baubau city. Thus, to perform the revitalization is an urgency through the mechanism of activating the role of cultural villages, the use of cultural values in the schools' curriculum particularly for beginner level in the terms of to mold their cultural foundation, the strengthening of pre-existing Buton's cultural institutions. These are involving with the key cultural components are Regional regulations (Perda). Further, they will be used to unearth the flexibility of the

* **Penulis Korespondensi**

Telepon : +62-821-8844-4075

Surel : tasrifin.tahara@yahoo.co.id

© 2019 Tasrifin Tahara, Mungsi Lampe, Dinna Dayana La Ode Malim



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons

Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

cultural values of Buton for future reference through the deepening of cultural values consciousness, in the sense of facing the threatened by the emergence of outsider values influences, the expansion of pop cultures, the distrust on the class antagonism and the other possibility of disturbance the authentic of cultural values.

Keywords: *social vulnerability, cultural values, refunctionalization.*

I. PENDAHULUAN

Kerawanan sosial dalam bentuk kekerasan dalam lima tahun terakhir seperti pembunuhan di Simpang Lima, konflik antar orang Tarafu vs. Bonebone, perkelahian di Kanakea dan lain-lain sudah semakin menakutkan bagi masyarakat Kota Baubau. Ini sudah menjadi masalah serius dan butuh penanganan bersama aparat keamanan dan pemerintah. Sebagai upaya preventif, perlu upaya lebih komprehensif, salah satunya dengan pendekatan budaya.

Nilai-nilai budaya adalah refleksi dari kearifan budaya suatu masyarakat. Ia terbentuk dari hasil internalisasi sistem nilai budaya, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, maupun karsa, sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya yang tinggi dari suatu masyarakat akan menumbuhkan kualitas masyarakat bersangkutan. Karena itu, nilai-nilai budaya yang hidup dalam kebudayaan suatu masyarakat perlu diinventarisasi guna menumbuhkan karakter bangsa.

Nilai-nilai karakter tidak dapat dipisahkan dari kelembagaan tradisional suatu masyarakat. Kelembagaan tradisional merupakan seperangkat ajaran dan kepercayaan yang bersifat ideal, yang berisi sistem nilai dan sistem pengetahuan lokal yang menjadi acuan bagi anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sejumlah aspek kehidupannya. Kelembagaan pada hakikatnya adalah sebuah tradisi, yang sekaligus dapat dipahami sama dengan kebudayaan. Kelembagaan dapat pula dimaknai sebagai pranata sosial (*social institution*), yakni sistem nilai serta sistem norma dan hukum tidak tertulis yang menjadi acuan dan pengendali setiap individu dalam sejumlah aktivitas kehidupannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kelembagaan atau pranata sosial merupakan bagian integral dari kebudayaan, berupa sistem kognisi yang merupakan pola bagi terbentuknya sistem perilaku (Naping, 2007, hlm. 74).

Parsons (2013, hlm. 78) menyatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai sistem nilai budaya yang mengatur pola pikir dan tata kelakuan individu-individu warga masyarakat bersangkutan. Sistem nilai tersebut merupakan

suatu konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran warga pendukung suatu kebudayaan, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan memaksa terhadap sistem-sistem gagasan dan perilaku warga masyarakat, yang berhubungan dengan segala aspek kehidupannya. Dari kerangka sistem nilai tersebut tergambar bagaimana warga suatu masyarakat memandang dunianya. Makna dunia dalam pengertian ini melingkupi pandangan dan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat terhadap keberbagaian dan kebanyakan dunia fisik, hidup manusia (termasuk aktivitas dan hasil aktivitas itu), lingkungan sosial, serta dunia transenden sebagai suatu keteraturan yang lengkap.

Dalam suasana transformasi masyarakat dewasa ini, terasa penting dan mendesak bahwa dalam rangka pembinaan kepribadian masyarakat diperlukan sebanyak mungkin pengetahuan tentang anasir yang lekat pada kesadaran budaya masyarakat itu sendiri. Anasir itu terkandung dalam wujud kebudayaan, berupa nilai-nilai, norma-norma, dan sejumlah peranan serta kaidah kehidupan yang tersimpul dalam aspek ideal kebudayaan. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku dan tata-cara manusia melakukan interaksi kehidupannya tersimpul dalam aspek kelakuan dari kebudayaan. Akhirnya, berbagai ramuan berupa bentuk-bentuk dan macam-macam peralatan fisik dari kehidupan terjelma dalam aspek fisik kebudayaan. Wujud kebudayaan tersebut berakar dan menjangkau masa silam, baik yang jauh maupun yang dekat. Sudah menjadi tugas tiap generasi untuk menjaga kesinambungan hidup dari wujud kebudayaan mereka, guna terpeliharanya keserasian dan perkembangan integrasi kepribadian masyarakat dalam proses pembangunan (Mattulada, 1995, hlm. 77).

Kota Baubau merupakan titik sentral peradaban Kerajaan dan Kesultanan Buton dimasa lampau, yang kaya dengan berbagai tata nilai yang diwariskan para leluhur Buton di masa lalu (Tahara, 2017). Termasuk tata nilai yang berkaitan dengan interaksi antar individu maupun kelompok di masyarakat. Oleh karena, kiranya perlu melakukan riset mendalam guna merefungsionalisasi budaya sebagai upaya pencegahan kerawanan sosial di Kota Baubau.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berorientasi untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami suatu pandangan atau konstruksi dari sudut pandang penduduk asli (subyek) yang diteliti. Inti dari penelitian ini adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang (subyek) yang diteliti (Spradley, 1997, hlm. 121). Penelitian dilakukan di Kota Baubau dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, pengamatan dan wawancara dengan informan aparat keamanan, tokoh adat, budayawan, dan akademisi di Kota Baubau. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan fenomena utama sebagai tema penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerawanan Sosial di Kota Baubau

Ada dua hal penting yang dihadapi oleh manusia dalam berinteraksi dalam sebuah komunitas, yang pertama adalah perbedaan wujud dari konstelasi dan aspirasi kehidupan yang diharapkan (*the constellation of ideal life*) dan yang kedua adalah dinamika sosial ekonomi yang diperlukan untuk mengelola kehidupan. Dua hal tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan budaya baik bersifat antar budaya maupun intra budaya. Oleh karena itu, Ritzer (2011) menekankan pentingnya menemukan keteraturan melalui berbagai karakteristik yang dapat mempersatukan manusia meskipun terdapat berbagai keberagaman dalam lapisannya.

Keserasian sosial dan konflik (sebagai akibat dari kerawanan dan kerentanan sosial) tidak dapat dilihat secara terpisah karena keduanya menyangkut bagaimana cara mengelola perbedaan dalam lapisan masyarakat Buton (Tahara, 2012). Kota Baubau yang merupakan kota yang sejak masa lampau sebagai akibat dari posisinya sebagai jembatan yang menghubungkan wilayah timur dan barat Indonesia telah menjadi kota yang heterogen juga tidak terhindar dari kondisi di atas, berbagai macam kasus yang muncul setiap

tahun semakin mempertegas bahwa terdapat potensi gesekan yang berubah menjadi kerawanan sosial. Berdasarkan data yang dihimpun dari kepolisian resor Kota Baubau mengenai 10 kasus kerawanan sosial di Kota Baubau sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2018.

Berdasarkan data dari Kepolisian, sepanjang tahun 2016, pencurian menduduki peringkat teratas dengan 190 kasus disusul dengan penganiayaan dengan jumlah 169 kasus. Kemudian tahun 2017, meskipun mengalami penurunan hingga 172 kasus, pencurian masih menempati kasus terbanyak dalam data Kepolisian Resort Kota Baubau.

Data dari Polres Baubau, tahun 2018 terjadi loncatan jumlah kasus penganiayaan dari tahun 2017 yang berjumlah 26 kasus menjadi 91 kasus yang membuat kategori kerawanan ini menjadi kasus tertinggi di sepanjang tahun 2018.

B. *Bhinci-Bhinciki Kuli*: Sebagai Etika Sosial

Di dalam masyarakat Buton, *bhinci-bhinciki kuli* telah menjadi "batu timbangan" untuk menimbang dan menilai perilaku hubungan sosial, baik antara sesama anggota masyarakat maupun antara penguasa pemerintah negeri. Ketika warga masyarakat menyaksikan perilaku siapa pun tanpa kecuali penguasa yang melampaui batas kewajaran sehingga merugikan orang lain, lantas terdengar kecaman masyarakat "*Yinda abhincikikulina*", artinya tidak mencubit dirinya sendiri. Ini dimaknai sebagai ungkapan kebencian dan protes masyarakat terhadap perilaku yang tidak wajar tersebut.

Nilai *bhinci-bhinciki kuli* mengandung substansi humanisme akan kesamaan umat manusia yang bersesuaian dengan yang diajarkan dalam humanisme Islam bahwa "Pada dasarnya manusia adalah sama di hadapan Tuhan, yang membedakan adalah rasa takwanya". Implikasi dari pandangan hidup seperti ini melahirkan moral yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya. Secara demikian manusia akan mencapai tingkat martabat yang layak untuk hidup dengan sesamanya di mana pun di dunia. Berdasarkan pada kesamaan tersebut sehingga, menurut Oba (2009), sangat patut

diduga bahwa masuknya Islam ke Buton yang tidak menimbulkan benturan dalam masyarakat dikarenakan humanisme Islam mendapatkan tempat dalam pangkuan etika sosial *bhinci-bhinciki kuli* yang dianut masyarakat Buton, yang pada gilirannya di antara keduanya telah terjadi proses akulturasi nilai-nilai budaya.

Persoalan bagi masyarakat Buton pada umumnya bahwa dewasa ini etika *bhinci-bhinciki kuli* sudah kurang dipahami oleh generasi muda Buton. Sementara di kalangan generasi tua sudah jarang pula memberikan keteladanan yang memadai. Oleh karena itu, nilai budaya *bhinci-bhinciki kuli* yang mempunyai jangkauan universal pada pokoknya ialah refungsionalisasi secara praktis untuk memperkuat dan menjaga harmonisasi sosial masyarakat Buton, khususnya di Kota Baubau yang sejak beberapa tahun terakhir cenderung diwarnai konflik dan kekerasan sosial, di samping dapat memperkaya nilai budaya nasional dan budaya dunia.

C. *Sara Patanguna*: Falsafah Hidup Kesultanan Buton

Dalam konteks hukum pemerintahan Kesultanan Buton, *bhinci-bhinciki kuli* itu, menurut [Saidi \(2009\)](#) menyatakan sila dasar yang melahirkan empat dasar hukum yang disebut "*Sara Patanguna*", yaitu:

1. *Pomae-maeka*, artinya saling merasa takut antara sesama anggota masyarakat.
2. *Popia-piara*, artinya saling merasa memelihara antara sesama anggota masyarakat.
3. *Pomaa-maasiaka*, artinya saling merasa menyayangi antara sesama anggota masyarakat.
4. *Poangka-angkataka*, artinya saling merasa menghormati antara sesama anggota masyarakat.

Secara makro, menurutnya, sila dasar *bhinci-bhinciki kuli* dengan empat dasar hukumnya itu mengandung makna sosial pada tiga strata sosial, yaitu:

1. Yang melebihi kita (yang lebih tua dan lebih tinggi pangkatnya), ditakuti.
2. Yang sama dengan kita (sesama umur maupun pangkat), dipelihara.
3. Yang kita lebih (mereka yang lebih muda

umur atau lebih rendah pangkat dari kita), kita sayangi.

Tantangan atau lawan dari *bhinci-bhinciki kuli* itu ditentukan empat pula, yaitu:

1. *Sabharagau*, artinya milik bersama dialihkan menjadi milik pribadi seseorang, atau pelecahan hak-hak orang lain.
2. *Lempagi*, artinya perbuatan melanggar ketentuan atau amanah, contoh: Si A menyimpan sesuatu barang pada Si B, lalu diambilnya tanpa sepengetahuan si B.
3. *Pulu mosala te mingku mosala*, artinya melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran hukum, gerak-gerik atau tingkah laku yang menunjukkan keangkuhan dan segala perbuatan tercela lainnya.
4. *Pebula*, yaitu melakukan zina dalam lingkungan masyarakat sekitar atau menipu masyarakat sekitar untuk keuntungan pribadi.

Secara mikro, [Saidi \(2009\)](#) menjelaskan tentang Sara Budiman Kesultanan Buton dalam mana *bhinciki-bhinciki kuli* menjadi sila pertama/dasar yang melahirkan empat sila lainnya, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1) *Bhinci-bhinciki kuli (Saling/Masing-masing mencubit kulit sendiri)*

Merupakan sila pertama atau sila/dasar yang berarti masing-masing orang atau anggota masyarakat bila mencubit kulitnya sendiri pasti akan terasa sakit. Oleh karena itu janganlah mencoba mencubit kulit orang lain sebab orang lain itu pun akan merasakan sakit sebagaimana Anda akan merasa sakit bila kulit Anda dicubit orang. Dikonkretkan maknanya menjadi janganlah Anda melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan atau menyusahkan orang lain, karena Anda pun tidak akan senang bila perbuatan serupa dilakukan atas diri Anda sendiri. "*Semua umat manusia (di mana saja dan kapan pun) niscaya tidak mau dan menghindari ancaman sakit atau penderitaan, terutama yang dilakukan antarsesama*". Menurut [Saidi \(2009\)](#), inilah inti dan hakikat persamaan yang ada pada diri seorang umat manusia, yaitu rasa dan perasaan sebagai karunia dari Yang Mahatinggi (Tuhan) yang tidak ternilai harganya. Inilah yang mendasari

hak asasi manusia karena itu wajib dipelihara, dihormati dan dijunjung tinggi secara bersama antara anggota masyarakat.

a) *Pomae-maeka (saling merasa takut antara sesama anggota masyarakat)*

Apakah yang saling ditakuti bersama itu? Hal yang ditakutkan adalah jangan sampai hak asasi setiap orang, kehormatannya bersama keluarganya, hak milik seluruh anggota masyarakat terganggu atau tercederai ketika terjadi hubungan sosial, proses kebersamaan dengan Sang Pencipta, sehingga agar supaya semuanya itu tetap terpelihara keutuhannya mereka itu harus saling merasa takut. *Pomae-maeka* adalah “nilai kepekaan budaya” (*sensitive-cultural value*). Dalam pengamalannya, Saidi (2009), mencontohkan secara detail seperti si kaya merasa takut untuk menindas si miskin, sebaliknya si miskin merasa takut mengganggu hak milik si kaya. Si pandai merasa takut memperbodoh si dungu, sebaliknya si dungu takut mengganggu kepentingan si pandai, rakyat merasa takut melanggar wewenang dalam kekuasaan pemerintah, sebaliknya pemerintah merasa takut melanggar hak-hak asasi rakyat dan demikian seterusnya. Apabila sila saling merasa takut itu tidak diindahkan lagi oleh masyarakat atau pemerintah, maka akan timbul sifat-sifat sebaliknya yaitu “Saling Rasa Berani”. Masing-masing pihak yang disebutkan di atas akan saling berani melanggar hak-hak asasi sesamanya. Bila si kaya sudah berani memeras si miskin, si pandai sudah berani menipu si dungu, pemerintah sudah berani menzalimi rakyat maka akan timbul pula rasa berani si miskin, si dungu dan si rakyat untuk bangkit melawan si kaya, si pandai dan si penguasa untuk mempertahankan hak-hak asasinya, kehormatannya, hak miliknya dan sebagainya. Apabila situasi demikian sampai terjadi dalam suatu

masyarakat atau negara akibatnya akan menimbulkan kekacauan, terganggunya stabilitas keamanan negara dan ketenteraman hidup bersama.

b) *Popia-piara (saling merasa memelihara antara sesama anggota masyarakat)*

Rasa saling memelihara antara sesama anggota masyarakat itu amat dibutuhkan dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Pada sila *Pomae-maeka* ditekankan saling merasa takut, mengandung pengertian pasif untuk tidak berbuat sesuatu yang ditakutkan dapat mencederai nilai, harga diri atau kehormatan dari sesama, sebaliknya *popia-piara* justru mengandung himbauan untuk bertindak secara aktif saling memelihara nilai-nilai yang dimiliki bersama setiap individual atau kelompok seperti hak asasi, harga diri, kepercayaan terhadap Tuhan, harta benda, jabatan, dan lain sebagainya. Untuk terwujudnya keamanan dan keselamatan bersama, semua yang disebutkan di atas wajib dipelihara bersama-sama oleh anggota masyarakat secara timbal balik. “Nilai sosial-budaya tersebut menjadi pendorong dan pembimbing partisipasi sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan bersama”. Dalam pengamalannya, Saidi (2009), mencontohkan secara jelas dan empiris seperti si kaya wajib memelihara hak-haknya si miskin seperti memberikan upah yang wajar atau memberikan sedekah, sedang si miskin wajib memelihara kepentingan si kaya dan tidak mengganggunya. Si pandai memelihara haknya si dungu seperti tidak berusaha menipunya. Sebaliknya si dungu wajib memelihara kepentingan si pandai. Rakyat memelihara keutuhan wewenang dan kekuasaan pemerintah sebaliknya pemerintah

wajib memelihara seluruh kepentingan rakyat seperti terjaminnya rasa keadilan, rasa aman bersama keluarganya, harta miliknya, keyakinan agamanya, dan lain sebagainya. Apabila pengamalan sila Popia-piara ini dilanggar, maka akan menimbulkan sifat-sifat sebaliknya yaitu “rasa saling merusak”. Si kaya memeras si miskin dan si miskin merampas hak-hak si kaya, si pandai menipu si dungu dan sebaliknya si dungu melawan si pandai, penguasa menzalimi rakyat sebaliknya rakyat melawan kekuasaan penguasa. Semua tindakan negatif tersebut berakibat rusaknya tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

c) *Pomaa-masiaka (saling merasa menyayangi antara sesama anggota masyarakat)*

Saling menyayangi dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara merupakan perekat utama persatuan dan kesatuan. Yang mana unsur-unsur dari *pomaa-masiaka* yang saling dirasakan secara timbal-balik itu? Itulah kasih, cinta, setia, kemesraan, keindahan, dan kesejukan. Sifat dan perilaku mulia ini, menurut Saidi (2009), akan mewujudkan kehidupan harmonis dalam masyarakat dan bangsa, akan tercipta suasana saling menyayangi antara si kaya dan si miskin, si pandai dan si dungu, pemerintah dan rakyat, demikian seterusnya. Selama sila *pomaa-masiaka* ini ditaati dan diamalkan seluruh komponen masyarakat, maka negara akan aman, rakyat hidup damai, makmur, tenteram dan bahagia. Tetapi bilamana sila *pomaa-masiaka* ini ditinggalkan maka akan lahir sifat-sifat serta perilaku sebaliknya yaitu rasa permusuhan, dengki, dendam, iri hati, curiga-mencurigai dan berbagai macam sifat serta perilaku negatif lainnya. Si kuat akan menindas si lemah, si kaya memeras si miskin, si pandai membohongi si dungu,

penguasa menzalimi rakyatnya. Sebaliknya si lemah, si miskin, si dungu dan si rakyat akan bangkit melawan si kuat, si pandai, si kaya dan si penguasa. Apabila hal-hal itu terjadi akibatnya adalah terjadinya kekacauan dan rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d) *Poangka-angkataka (saling merasa menghormati antara sesama anggota masyarakat)*

Saling menghormati bagaikan tali emas yang menghubungkan hati nurani, mendekatkan bahkan memadukan hati antarmanusia. Betapa indahnyanya dalam suatu masyarakat dan bangsa yang hidup saling menghormati, saling menghargai sesamanya tanpa dibatasi oleh pangkat dan kedudukan. Nilai-nilai keutamaan dimiliki setiap manusia yang menjadikan warga masyarakat saling merasa takut mengganggunya melainkan saling memeliharanya, itulah yang menghendaki rasa dan sikap saling menghormati. Sebab nilai-nilai keutamaan yang dibangun dan dimiliki setiap individu atau kelompok terwujud atau teraktualisasikan dalam saling menghormati. Dalam sila *poangka-angkataka* ini, menurut Saidi (2009), terkandung pula pengertian bahwa orang-orang atau warga negara yang memiliki sesuatu kelebihan dari anggota masyarakat lainnya seperti berilmu pengetahuan tinggi dan ilmunya itu berguna bagi masyarakat, hartawan yang mendermakan kekayaannya untuk kepentingan umum, atau karena keberaniannya telah berjasa menyelamatkan negara, kepada mereka itu diberikan penghormatan dan balas jasa tertentu oleh pemerintah. Pemberian balas jasa atau penghormatan itu biasanya dalam wujud seperti diangkat menduduki sesuatu jabatan dalam pemerintahan atau dianugerahi

sebidang tanah yang disebut "katampai". Tanah *katampai* ini menjadi hak miliknya turun-temurun. Menurut **Saidi (2009)** bahwa apabila sila ini tidak lagi diindahkan, maka dalam masyarakat akan timbul sifat-sifat sebaliknya, yaitu rasa saling membenci. Antara seseorang dengan yang lain merasa seperti terasing, saling tidak mengacuhkan. Situasi dan kondisi demikian akan menyuburkan rasa egois, angkuh tidak memedulikan lagi kepentingan orang lain, tiap orang hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri beserta keluarganya. *Bhinci-bhinciki kuli* dan empat sila lainnya menjadi sumber inspirasi dan kreativitas inovatif para tokoh, cendekiawan, budayawan atau seniman di masa lalu dalam rangka membuat ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai budaya dan filosofi lokal yang karena muatan universalnya sehingga dengan mudah diakulturasikan dengan nilai-nilai sosial-budaya yang bersumber dari luar khususnya ajaran agama Islam.

D. Nilai yang Bersumber dari Agama Islam: Kadar Spiritualitas Individu

Menurut **Said (2006, hlm. 112)**, bahwa nanti pada era sultan ke-4, Dayanu Ikhsanuddin, gerakan Islam yang dimulai dari tatanan kerajaan dibangun. Kerajaan pada saat itu sudah mulai didasarkan pada ajaran Islam, yang ditandai dengan disusunnya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yang disebut sebagai Murtabat Tujuh. Sebagaimana istilahnya, Murtabat Tujuh merupakan dasar moral pemerintahan kesultanan, yang berintikan tujuh pokok ajaran, sebagai berikut.

Pertama, Martabat Ahadiyah. Martabat ini wujud Tuhan merupakan zat yang mutlak lagi mujjarad, tidak bernama dan tidak bersifat. Tuhan menurut paham ini hanya dapat dikenali melalui pengenalan terhadap alam. Pemahaman seperti ini agaknya mengakar pada ajaran tasawuf Imam Al Gazali, yang mengatakan bahwa Tuhan dapat dikenal tanpa melalui sifat, asma dan alam, tetapi melalui hati esensi zat-Nya dapat dipandang. Kedua, Martabat Wahidyyah, disebut juga Martabat

Tajalli Zat (limpahan yang paling suci), yakni penampakan Zat yang Mujarrad melalui sifat dan asma. Sifat dan asma tersebut merupakan hakikat alam nyata, namun belum memiliki wujud karena yang riil hanyalah Tuhan semata. Ketiga, Martabat Tajalli Syuhudi, disebut juga al faid al muqaddas (limpahan suci), yaitu Tuhan bertajalli melalui asma dan sifat-Nya dalam kenyataan empiris. Penampakan Tuhan dalam alam empiris ini adalah proses tajalli yang kedua. Keempat, Martabat alam arwah. Yakni tingkat terciptanya seluruh roh dari segala makhluk dan bersumber dari wahidyyah tadi. Kelima, Martabat alam mitsal, di mana pada tingkat ini terciptanya bayangan segala tubuh makhluk alam raya, malaikat, jin dan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Keenam, Martabat alam ajsam, pada tingkat ini segala jenis tubuh makhluk sudah terbentuk di dalam lingkungan dan tempatnya masing-masing seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ketujuh, Martabat alam insan. Pada martabat sudah tercipta selengkap-lengkapnya seorang manusia tubuh dan roh, dan kemudian lahir di dunia sebagai makhluk sempurna (insan kamil), makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan seindah-indah dan sebaik-baik makhluk.

Mengenai perjumpaan yang membaaur antara ajaran Islam (Martabat Tujuh), menurut Ansari (Informan) dapat dilihat pada pasangan-pasangan keempat sila dengan ayat-ayat dalam Alquran, seperti di bawah ini:

Pertama, *pomaa-masiaka* landasannya surat Al-Baqarah, Al Imran, dan Al Ayabud. Kemudian *poma-masiaka, pomae-maeka* cari di surah Al Baqarah dan Al Azhab. Kemudian *poangka-angkataka* cari di surah Yusuf dan Annur. Kemudian *popia-piara* cari di surat Al Hultan Attahyun.

Tentang sejauh mana Murtabat Tujuh diimplementasikan dalam sistem kepemimpinan pada masa kepemimpinan Kesultanan Buton, demikian halnya oleh masyarakat Buton dari dahulu hingga sekarang sedikit banyak dijelaskan oleh Said dalam tulisan "Perjumpaan Islam dan Budaya Buton: Spiritualitas, Moralitas dan Etos Kerja" sebagai berikut:

...tindakan-tindakan politik yang dilakukan pihak kerajaan kemudian dilakukan dan atau terkait erat antara dua hal, yakni tanggung jawab untuk kesatuan masyarakat Buton, dan syiar Islam. Konstitusi kesultanan pun, menetapkan Islam sebagai dasarnya, seperti sudah dijelaskan disebut Murtabat Tujuh...

...paling tidaknya, syarat-syarat bagi kepemimpinan dan tata cara pemilihan Sultan seperti yang ditetapkan dalam Murtabat Tujuh, kemudian terlupakan, dan hanya menjadi agenda sejarah perjalanan pemerintahan di Buton. Dalam pemilihan kepemimpinan di Kabupaten Buton kemudian, syarat itu secara tersurat tidak pernah dijadikan acuan lagi, karena sudah digantikan oleh aturan-aturan formal yang tampak lebih sekuler...

...baik pada tingkat tatanan normatif yang dibangun oleh pihak Kesultanan Buton maupun kondisi spiritual masyarakat yang selalu mengajarkan kebaikan, secara ideal menjadikan orang Buton memiliki etika moral Islamis dalam perilaku kepemimpinannya (pada saat mereka menjadi pemimpin). Tetapi apakah itu bertahan hingga saat ini? Sebab ...mencari nafkah mengarungi lautan bagi orang Buton yang mengakar Islamnya adalah langkah ikhtiar mencari nafkah di bumi Allah ini, sementara aturan formal negara mengatakan itu "haram..."

Pokok persoalan kajian tentang nilai-nilai budaya Buton yang berfungsi meredam gejala konflik dan kekerasan sosial sangat berkaitan dan ditopang dengan nilai-nilai spiritual keagamaan yang dianut. Dalam penjelasannya, **Abubakar (1999)** memulai dengan pertanyaan penting: apakah tolok ukur rendah atau tingginya kadar spiritualitas seseorang? Menurutnya bahwa menjawabnya tentu sangat sulit dikarenakan hal ini berkaitan langsung dengan kualitas keberagaman seseorang. Namun bagi orang-orang Buton menurutnya, yang pertama kali harus dipahami, bahwa mereka adalah komunitas Islam. Semua tindakan atau perilaku dilakukan, filter utamanya, dan itu secara langsung seakan berjalan alami, adalah apakah itu sesuai dengan ajaran Islam menurut pemahaman mereka atau tidak. Bila sesuatu tindakan bertentangan dengan ajaran Islam, maka otomatis itu akan memperoleh rintangan dari intern jiwa individu yang bersangkutan. Sebaliknya bila suatu tindakan atau perilaku sudah memperoleh justifikasi tradisi, maka

setiap seseorang itu sudah dijamin berdasarkan tradisi, tradisi mana sudah berdasarkan atau paling tidak diberi "baju" Islam.

Kontrol dari tindakan seseorang, bagi orang Buton, adalah bersumber dari dalam diri dan oleh masyarakat. Pada tingkat intern diri seseorang, tentu akan selalu berkaitan dengan kadar pemahaman dan terinternalisasinya ajaran Islam bagi bersangkutan. Sebaliknya oleh masyarakat sekitar, dianggap sebagai fakta sosial (*social facts*), di mana sebuah pelanggaran dalam bentuk pemikiran dan tindakan yang dilakukan individu niscaya memperoleh reaksi dari masyarakat sekitarnya. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial, dan bahkan termasuk akan memperoleh label sosial, sebuah vonis dari pengadilan sosial.

E. Falsafah dari Para Leluhur dan Tokoh Cendekiawan/Budayawan Kekinian

1) *Hakekat Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia*

Dalam konteks kajian nilai-nilai sosial-budaya yang menjaga tatanan berkehidupan masyarakat yang harmonis dan kokoh, maka relevan pula mengangkat penjelasan Abubakar mengenai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Pada kebudayaan masyarakat Buton, nilai budaya pada hakikat hubungan manusia dengan manusia, akan tercakup dalam prinsip komunikasi sosial Buton yang berwujud "*Binci-binciki kuli*" sebagai simpulan dari "*Sara pata anguma*" yakni "empat sila yang merupakan pilar harmonisasi tata-pergaulan hidup", yang terdiri dari: *Poangka-angkataka* yakni saling hormat menghormati. *Poma-masiaka* yakni saling kasih mengasihi. *Popia-piara* yakni saling pelihara memelihara dan *Pomae-maeka* yakni saling taat-menaati hak asasi.

Dalam budaya Buton hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya terkonsepsikan dalam beberapa manifestasi, antara lain:

- a) *Nilai budaya pada hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya*
Titik berat nilai budaya daripada sikap dan aktivitas manusia yang diarahkan demi pengabdian dan bakti

kepada pihak atasan, atau sebaliknya atasan hanya memfokuskan perhatian dan perannya untuk kesenangan kelegaan bawahannya.

Nilai budaya seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari dipertajam dengan falsafah orang tua-tua sebagai berikut:

Nasihat para orang tua-tua:

Pertama, yang dimaksud dengan lurus (bijak) itu, andai hanya sedikit salahnya, yang banyak itu bolehlah diampuni (diperbaiki).

Kedua, yang dimaksud dengan tahu (pandai) itu, tiada dilaksanakan sesuatu pekerjaan, melainkan diketahui terlebih dahulu dampak akibatnya kelak.

Ketiga, yang dimaksud dengan berani (kesatria) itu, tiada cemas/goyah hatinya mendengarkan cercaan/ancaman maupun mendengar pujian.

Keempat, yang dimaksud dengan murah hati/dermawan itu, memberi makan siang dan malam kepada sesamanya, malahan tambah berseri-seri wajahnya.

b) *Nilai budaya pada hubungan horizontal antara manusia dengan manusia*

Titik berat nilai budaya daripada sikap dan aktivitas seperti ini, bahwa rasa ketergantungan terhadap sesama tingkat sosialnya akan banyak mewarnai sikap dan peran di dalam kehidupannya. Di sini rasa kegotongroyongan dianggap sangat penting, karena di dalam kehidupan ini, pasti rasa senasib-sepenanggungan itu merupakan perekat kesetaraan hidup.

Ada pula falsafah orang tua-tua yang dijadikan tuntunan hidup masyarakat, sebagai berikut:

Pohamba-hambamoimingkunamanga sea yitu tulada poluadari to yi magagakana giuyi potimbawata. Temo duka soda mparagigi yitu polanciringana mia bari moarona karaja maoge. Ronamo mobarina yitu oaemo mosodana bada potimbawata.

Artinya:

Tolong menolong yang diperagakan masyarakat semut itulah teladan pelajaran kebersamaan yang menjadikan ringannya segala sesuatu yang dipikul.

2) *Falsafah Ibu Sebagai Panutan dalam Membangun Kehidupan Bersahaja Masyarakat*

Apa yang kita inginkan dan apa yang kita takuti dengan kerawanan sosial? Itulah pertanyaan yang mendahului penjelasan oleh A. M. Kasim Siruhu (Tokoh dan Budayawan Buton) mengenai makna hidup. Baginya, pertanyaan makna hidup ini semua orang bisa menjawab, walaupun masih anak-anak semuanya bisa memaknai hidup, apakah tamat TK, SD atau lainnya, semua sama, karena gurunya hanya satu. Tidak ada yang melewati guru ini dan gurunya hanya satu. Siapa guru dan bagaimana panutannya?

“Yincema guru kaogesana? Yincema?”

O Inamu, kamata kaadarina yinamu

Okaadarina yinamu yitu, osiytumo kaogesana kaadari”.

Panutan ibumu itu, itulah panutan yang termasyhur di muka bumi.

Apa dan bagaimana panutan ibu itu? Penjelasan sebagai berikut:

“Ukamataea ndea yinamu...Baabaana mataua dhangiamo antoa kompona,

Opea a fikiri? Tuapa nda naana yi yantona kompoku siy, yinda ka maara,

Ande yindaka maara, ane yiyakini mea yindaka maara yi yantona kompona siy, ayakinimea yindaka mapi.

Ane yindakaamaara yindamo amapii

Agoramo, alhamdulilah asalamatimo garaaka naa naa siy”

Artinya:

Pertama-tama seorang Ibu menyantuni anaknya

dari rahim, setelah dia merasa anaknya mengharapkan bantuan dari dirinya. Mulai dari terlambat bulan sampai lahir, maka Ibu cepat-cepat mencari makan agar anaknya tidak merasa lapar. Setelah seorang ibu meyakini anaknya tidak lapar, timbul keyakinannya bahwa si anak tidak sakit. Kalau sudah diyakini si anak dalam kandungannya tidak lapar dan tidak sakit, lantas ibu cepat bersyukur kepada Allah, *Alhamdulillah*.

“Anaana siy alingkamo karaja, yindapo alingka karaja apaumba mea yinana, elaoti lingkamo karaja yitu? (yinawu, yi tawo, yi kantori) Kandepo Kandepo Kandepo” bholimo pili-pili, opea mo dhangiana yi bhawona meja yitu kandepo, ane yinda ukande yitu u maara, umapi, yinda mbalimo ulingka yi kantori. Te kabharina karajamu yitu”.

Berapa lama seorang ibu menyantuni anaknya, mulai umur 4 bulan di dalam perut sampai si anak mulai bisa bekerja, inilah yang dikatakan orang tua kita di Buton, inilah guru yang termasyhur.

A. M. Kasim Siruhu mau mempertegas makna ibu sebagai panutan dan memperluas makna ibu ke pihak-pihak pemimpin dengan mempertanyakan lagi, apa yang hilang di kita ini? Siapa yang menjadi panutan dan penyantun mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah? Sementara untuk belajar dari panutan ternyata dekat sekali dengan kita. Dan kapan dikatakan seorang panutan itu berhasil? Jawaban terhadap pertanyaan ini yang paling penting. A. M. Kasim Siruhu lalu menjawab dan menjelaskannya sendiri sebagai berikut:

Naile naepua yitu olaoti, ambulimo minaka karaja apaumbaya oninana oamana,

Oina, Oama, opea manasu oeyo siy, ane membali bholimo manasu eyo siy inae, dampo ku takako kinande minaka yi kota, paumbaya manga akaku, manga andiku, taporomu romu, ane membali paumbaya manga witnai sawetana yitu, kembaya yi bhanua ta po romu romu, naikido malo ta kande yi bhanua, roonamo eyo siy ku tarima gaji.

Jadi keberhasilan seseorang itu, tatkala ia sampaikan kepada ayah dan ibunya, *“maak-paak”*, ini hari saya terima gaji, saya akan beli makan dari kota, saya akan bawakan sama mama, jangan *mi* memasak *ma*, tolong sampaikan kepada kakak dan adikku kalau bisa dengan tetangga agar kita bisa sama-sama makan.

Inti dari pembicaraan ini adalah pola hidup sederhana dengan tiga arahan/petunjuk, yakni:

1. *Ane yindapo maara, bholimo peelo mambosu*
2. *Ane yindamo mapii, bholimo peelo kasana*
3. *Jagania aratamu, jagania yinyawamu.*

Artinya ada tiga hal yang harus dijaga di muka bumi ini, yakni:

1. Jika kamu sudah tidak lapar, jangan sampai ada yang lapar di sekelilingmu (zakat, infak, sedekah), ini interaksi sosial sudah mulai muncul *Arrahmani Rahim*.
2. Kalau kamu sudah tidak merasakan sakit, jangan sampai kamu sakiti orang lain
3. Hai pemimpin, hai kamu, tugas kamu, jangan sampai kamu melihat harta masyarakatmu itu tidak terjamin, nyawanya juga itu tidak terjamin. Jangan lapar, santuni orang. Jangan sakit, jangan sakiti orang, dan jamin keselamatan hartamu dan nyawamu, *insyaallah* kamu selamat dunia dan akhirat.

Jadi mau dijawab tentang apa yang diinginkan. Jadi apa yang kita ceritakan ini adalah keinginan kita untuk bagaimana menciptakan kemakmuran, sebab kemakmuran itu adalah lambang kesejahteraan, itulah yang kita inginkan sekarang, tatapi kesejahteraan dan kemakmuran sehebat apa pun yang kita ciptakan di muka bumi ini wahai manusia, itu tidak akan sama dengan surga, itu sebatas keimanan sementara saja.

Ukia-kiaaya te ukia-kiaaya laoti, bholi lau-launa maeka yinda mungki apokana te Naraka.

Kita melihat ada segala rupa yang keliru, teman kita yang keliru, pimpinan kita yang keliru, begitu sombong kita mencaci maki di tengah jalan, seakan akan ini sudah aman dari neraka, begitu hebat kita punya ketakutan, mungkin begitu juga perasaan kita sehingga seminar kita lakukan.

Sehebat apa pun kita berkelompok kita menghancurkan dunia ini sehancur-hancurnya kita tidak akan melihat neraka, paling kita melihat musibah, ini yang kita takutkan.

Berapa kali diterangkan di dalam Al-Quran di dalam Injil di dalam Zabur, hati-hati siksaan itu keras, dahsyat hati-hati. Jadi pertanyaannya kita

membuat kemakmuran kita tidak melihat surga, kita tidak melihat neraka.

F. Strategi Refungsionalisasi Nilai-nilai Budaya dan Falsafah Buton

Nilai-nilai budaya Buton yang kaya dan kompleks sangat potensi besar untuk dibangkitkan dan direfungsionalisasi dalam berkehidupan masyarakat secara harmonis dan kokoh serta dinamis ke depan. Dalam rangka refungsionalisasi tersebut, diperlukan sebuah strategi yang menggabungkan sekurang-kurangnya ada lima langkah yang ditempuh secara bersamaan.

Pertama, Desa adat memainkan peran utama dalam mendorong bangkitnya kembali unsur-unsur budaya tradisional yang dinilai positif di segala bidang kehidupan meliputi sistem kepemimpinan, pendidikan, norma hukum, upacara-upacara dan kegiatan yang melibatkan segenap warga masyarakat (perkawinan, ibadah, pendirian rumah), pengelolaan lahan pertanian dan hutan, pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut, dan sebagainya yang berfungsi pengaturan kehidupan bermasyarakat. Melalui pengaktifan peran desa adat tersebut niscaya nilai-nilai budaya lokal, terutama berkaitan dengan tata cara berkehidupan bersama bisa hidup kembali. Konsep dan program desa adat dapat mengantisipasi arus globalisasi dengan modernisasi teknologi dan komunikasi dari negara-negara maju yang menciptakan hegemoni desa buana (*global village*) yang cenderung tidak atau kurang mengindahkan dan terikat pada sistem birokrasi dan budaya nasional atau lokal sebagai karakter bangsa.

Kedua, Pembentukan dan pemungisian lembaga adat berbasis suku bangsa di setiap daerah provinsi dan kota di Indonesia, tidak terkecuali Lembaga Adat Buton di Kota Baubau, telah mendapatkan peluang dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan pemerintah. Peran lembaga adat tersebut dalam membangkitkan fungsi-fungsi budaya tradisional bisa menjadi efektif karena visi dan misi serta program-program kegiatannya memang terfokus pada pengelolaan pengembangan budaya lokal di tengah-tengah pengaruh arus dan proses modernisasi dan globalisasi.

Ketiga, sebuah langkah strategi yang diasumsikan tak kalah efektifnya dalam merevitalisasi dan merefungsionalisasi nilai-nilai budaya tradisional ialah memerankan pendidikan formal dengan basis hukum. Caranya ialah melakukan seleksi terhadap nilai-nilai budaya lokal-tradisional yang dianggap utama untuk dijadikan sebagai mata pelajaran dan dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTP atau bahkan SLTA. Fasilitator Pendidikan nilai-nilai budaya lokal tradisional ialah para guru (guru-guru SD, SLTP, SLTA).

Keempat, Kebijakan pemerdaan budaya tradisional, termasuk budaya Buton di Kota Baubau, juga diharapkan menjadi sebuah langkah strategis dalam rangka refungsionalisasi secara efektif beberapa unsur/komponen budaya tradisional utama yang sesuai dengan kebijakan tersebut.

Kelima, Keraton bisa memainkan peran penting dan menentukan dalam upaya refungsionalisasi sistem nilai budaya dan falsafah leluhur Buton khususnya pada warga masyarakat Kota Baubau ke depan. Peran Keraton yang dimaksudkan terutama sebagai sumber atau stok dan pabrik produksi unsur-unsur nilai budaya yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai kepemimpinan dan pemerintahan, hukum perundang-undangan, dan sebagainya yang menjadi pedoman dan memberi karakter bagi proses penyesuaian diri terhadap proses perkembangan peradaban (budaya tinggi) yang berlangsung secara terus-menerus.

Keenam, peran lembaga agama Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh para tokoh dan cendekiawan atau budayawan Buton bahwa telah terjadi percampuran (*acculturation*) dan bahkan hingga tahap-tahap tertentu merupakan pembauran (*assimilation*) antara nilai-nilai budaya lokal-tradisional Buton dengan ajaran dan praktik agama Islam. Nilai-nilai budaya lokal-tradisional berinti atau berciri agama, demikian halnya agama bersesuaian dengan dan berkarakter nilai-nilai lokal tradisional Buton. Tatanan dan kandungan atau kualitas demikian telah membuktikan kemampuan sejak ratusan tahun sehingga perlu tetap direvitalisasi dan direfungsionalisasi dalam mana lembaga

agama Islam memainkan peranan sangat penting sebagai mitra lembaga-lembaga lainnya.

Ketujuh, kelompok-kelompok kekerabatan yang dimulai dari keluarga inti (*nuclear family*), keluarga luas (*extended family*), rumah tangga (*household unity*) hingga kesatuan-kesatuan serumpun merupakan (*clans*) merupakan lembaga-lembaga sosial, terutama keluarga inti dan luas, yang berfungsi pembudayaan pada tataran pengetahuan atau mentalitas/nilai-nilai budaya (*enculturation*), pola-pola tindakan sosial (*socialization*), dan penanaman kepribadian (*internalization*) pada tahap-tahap awal. Jadi sebelum memasuki dunia pendidikan formal, secara ideal atau aktual manusia sudah memiliki kebudayaan pada wujud-wujud nilai, perilaku sosial, dan sikap dan kepribadian yang baik seperti yang diharapkan dalam berkehidupan bermasyarakat.

IV. KESIMPULAN

Sebagai sebuah wilayah eks Kesultanan Buton, sebenarnya kerawanan sosial sebagai bentuk kekerasan tidak akan terus menerus terjadi apabila nilai-nilai budaya warisan leluhur Kesultanan Buton berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Baubau saat ini. Nilai-nilai budaya *bhinci-bhinciki kuli* sebagai landasan interaksi kehidupan sehari, *sara pataanguna* yang pernah berlaku masa Kesultanan Buton dan pesan-pesan leluhur serta nilai-nilai kearifan lokal lain yang saat ini masih melembaga dalam struktur masyarakat Buton khususnya di Kota Baubau.

Sebagai sebuah upaya maka dari hasil penelitian ini perlu dilakukan strategi refungsionalisasi budaya Buton sebagai upaya resolusi kerawanan sosial di Kota Baubau dengan berbagai upaya sepertinya sosialisasi dalam berbagai kesempatan sampai pada tingkat RT/RW, memfungsikan lembaga adat dan desa adat sebagai model kelembagaan nilai-nilai budaya, penguatan melalui muatan lokal pada kurikulum sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dari paling penting adalah penguatan dari sisi hukum positif yang berlaku di negara Indonesia dengan penguatan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan pembentukan peraturan daerah berkenaan dengan penguatan nilai-nilai budaya Buton

dalam praktik kehidupan sehari-hari pada masyarakat Kota Baubau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselenggaranya penelitian ini kami tim peneliti mengucapkan penghargaan kepada segenap informan selama penelitian berlangsung, Kepolisian Resor Kota Baubau dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Ucapan yang khusus kepada Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui dana APBD tahun 2019. Tak lupa juga ucapan terima kasih atas dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin.

V. REFERENSI

- Abubakar, L. O. (1999, Maret). Memahami Nilai-nilai Budaya Masyarakat Buton. *Majalah Budaya Buton Wolio Molagi*.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Hasanuddin University Press.
- Naping, H. (2007). *Kelembagaan Tradisional dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Toraja*. PPLH Regional Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua KLH bekerja sama dengan Masagena Press.
- Oba, L. O. M. (2009, Maret). Bhinci-bhinciki Kuli. *Majalah Budaya Buton Wolio Molagi*, 4-5.
- Parsons, T. (2013). *The Social System* (2 ed.). Routledge.
- Ritzer, G. (2011). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Said, D. (2006). Menelusuri Jejak Kota Baubau dalam Lintas Sejarah Nusantara. *Prisma*.
- Saidi, E. A. Moh. (2009, Maret). Bhinci-bhinciki Kuli. *Majalah Budaya Buton Wolio Molagi*, 9-11.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.
- Tahara, T. (2012). Reproduksi Stereotip dan Resistensi Orang Katobengke dalam

Struktur Masyarakat Buton. *Antropologi Indonesia*, 33(2), 75-97. <https://doi.org/10.7454/ai.v33i2.2129>

Tahara, T. (2017). The Continuity of the Butonese Traditional Gobs' Business as the Economic Empowerment of the

Indonesian Islanders. *International Journal of Business and Management Studies*, 6(1), 113-120. <http://www.universitypublications.net/ijbms/0601/html/P6G103.xml>